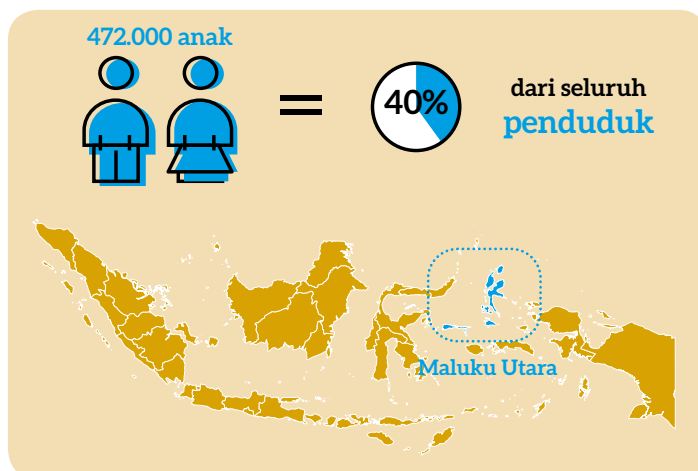




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Maluku Utara termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 472.000 orang atau 40 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Tiga per empat anak tinggal di wilayah perdesaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



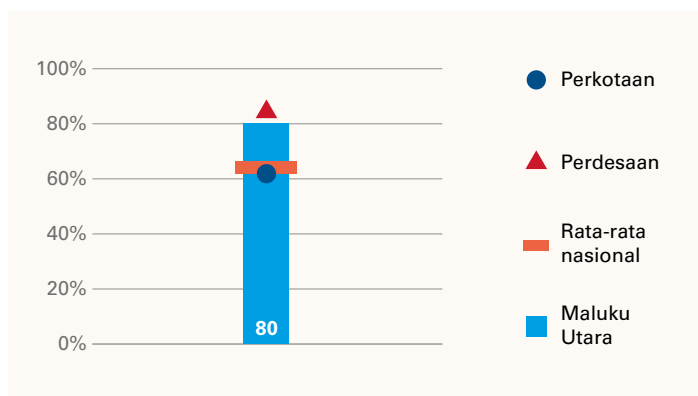
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Sekitar 40.000 anak (9 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 11.312 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi kemiskinan. Selain itu, delapan dari 10 anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Maluku Utara

	Persen	Jumlah
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	6,8	80.000
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	8,5	40.000
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	56,1	265.000



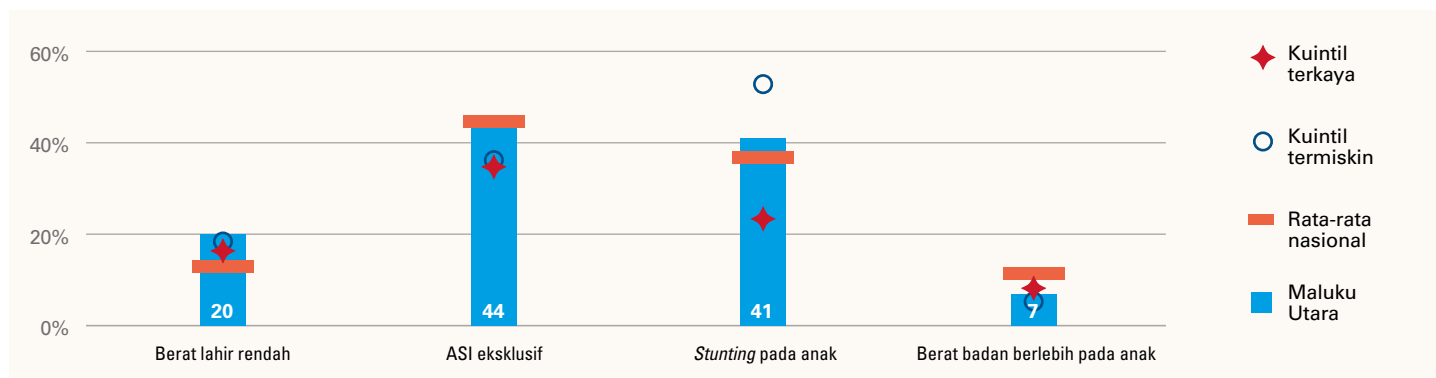
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Pada 2015, empat puluh empat persen bayi di Provinsi Maluku Utara diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti sama dengan angka

rata-rata nasional. Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan. Sekitar 20 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan lebih dari empat di antara 10 anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



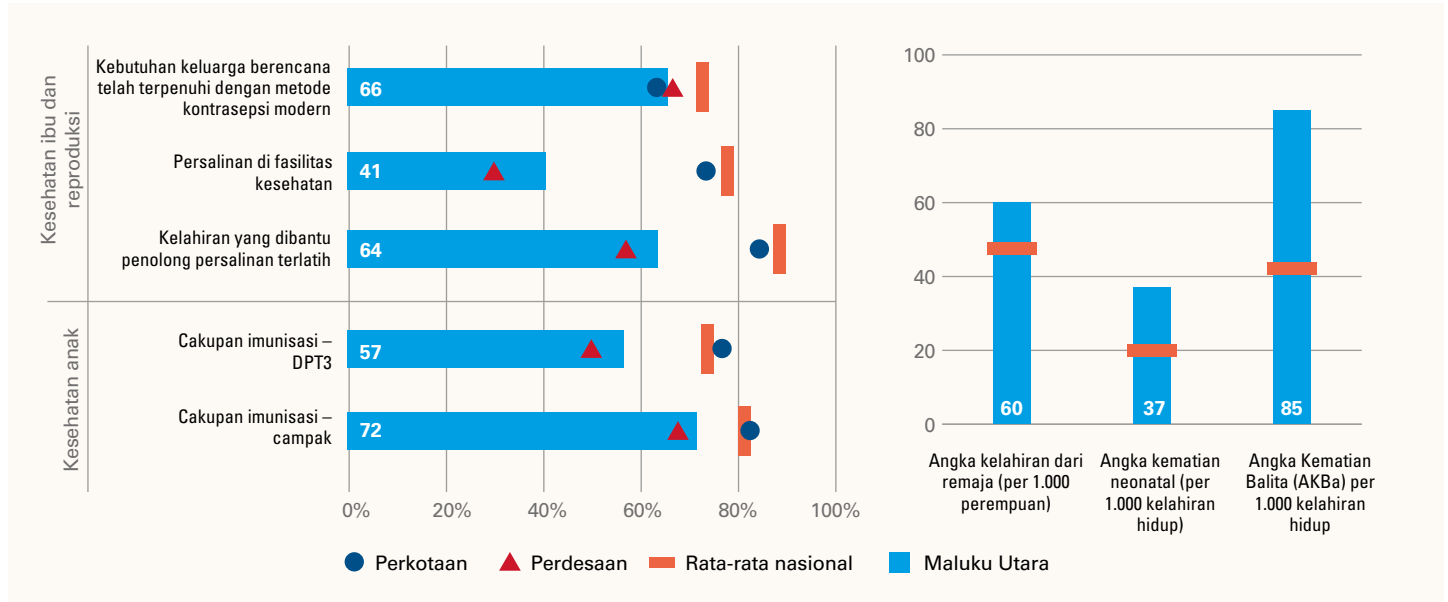
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih sangat tinggi. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 37 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupannya dan 85 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting. Kurang dari tujuh di antara 10 perempuan dewasa dan remaja usia 15–49 tahun yang kebutuhan keluarga berencananya terpenuhi dengan metode kontrasepsi

modern pada 2015, dan 64 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Tingkat akses ke layanan kesehatan cenderung lebih rendah bagi ibu dan anak di wilayah perdesaan.

Pada tahun 2015, hampir tiga per empat bayi menerima vaksinasi campak, dan 57 persen bayi menerima tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan. Diperlukan upaya terus-menerus untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi.

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

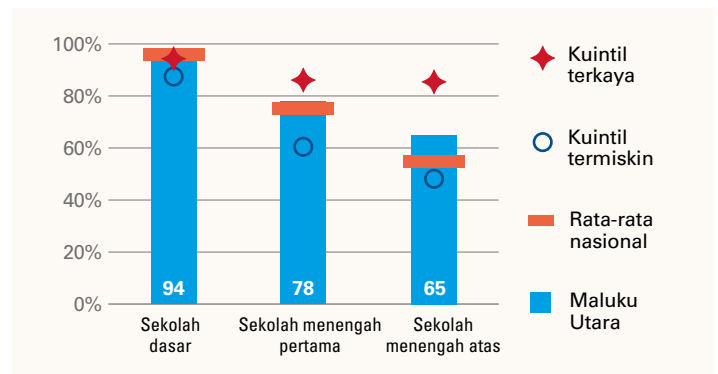
PENDIDIKAN BERKUALITAS



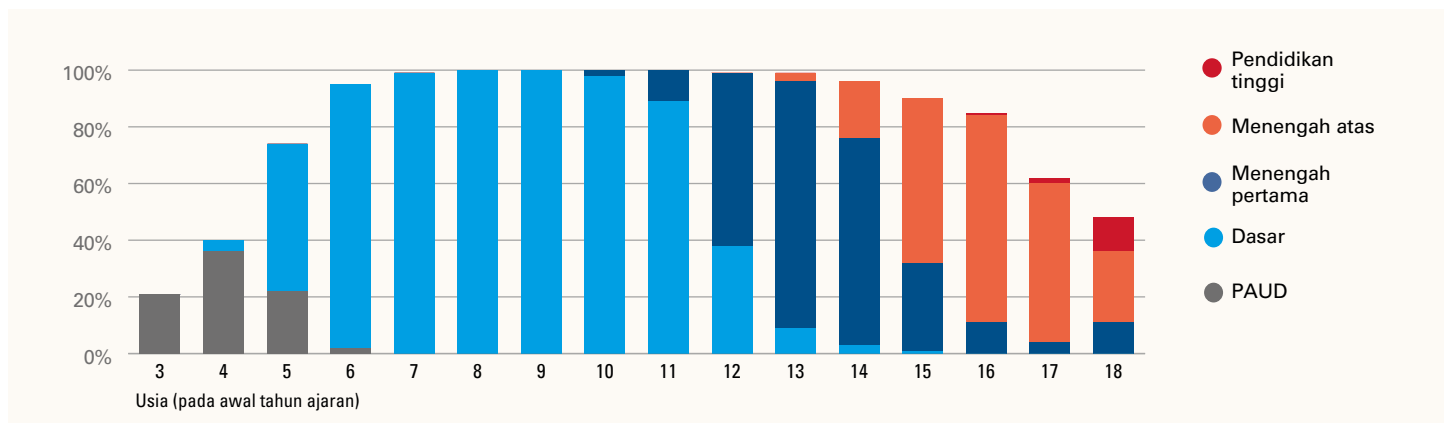
Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 95 persen pada tahun 2015, meskipun sebagian besar anak pra-sekolah sudah masuk sekolah dasar. Provinsi Maluku Utara hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya seperempat anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 14 persen anak dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



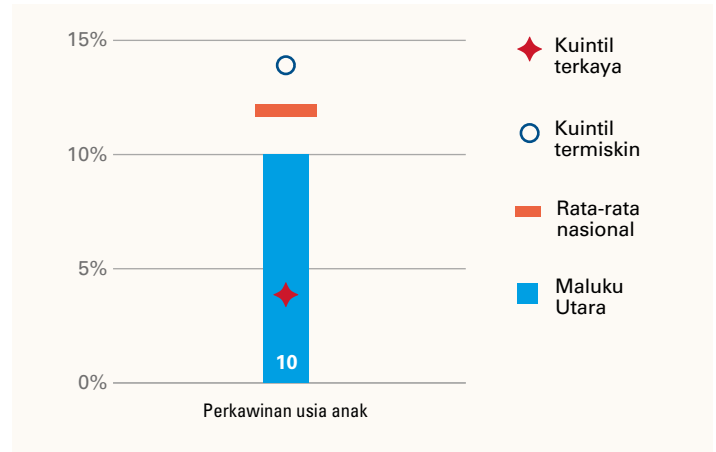
Praktik perkawinan usia anak telah menurun. Di Provinsi Maluku Utara, 10 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015, yang berarti di bawah rata-rata nasional. Tingkat perkawinan usia anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

10% perempuan menikah sebelum berusia 18



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak

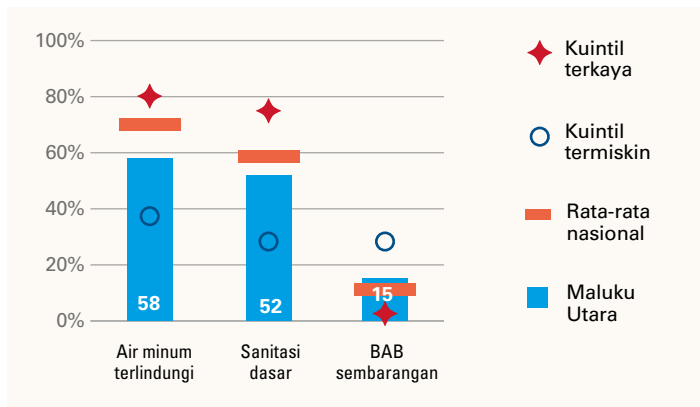


TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI



Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan kebersihan sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, sekitar setengah dari jumlah penduduk menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara 15 persen masih mempraktikkan BAB sembarangan. Hanya 20 persen sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



Cakupan sumber air minum yang layak sudah lebih tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik serta makin memperluas cakupan program sanitasi total berbasis masyarakat.

sekolah dengan layanan air dasar = 76%

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%) 76
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%) 20

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%) 13

TUJUAN 16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

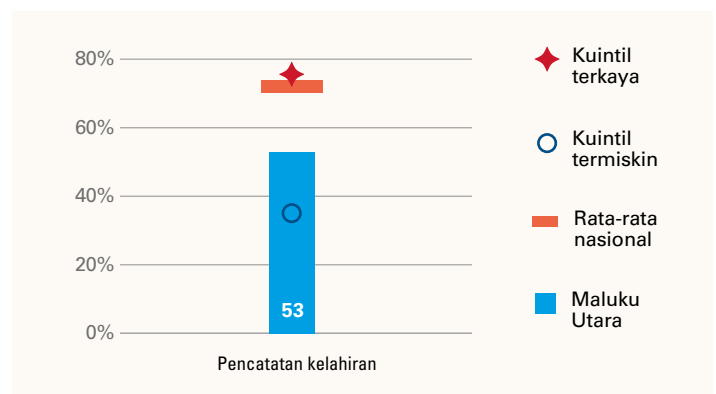


Peningkatan angka pencatatan kelahiran perlu dipercepat: hanya setengah dari anak berusia di bawah 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran pada tahun 2015. Masih, terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi Maluku Utara, 17 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, yang berarti di bawah rata-rata nasional.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

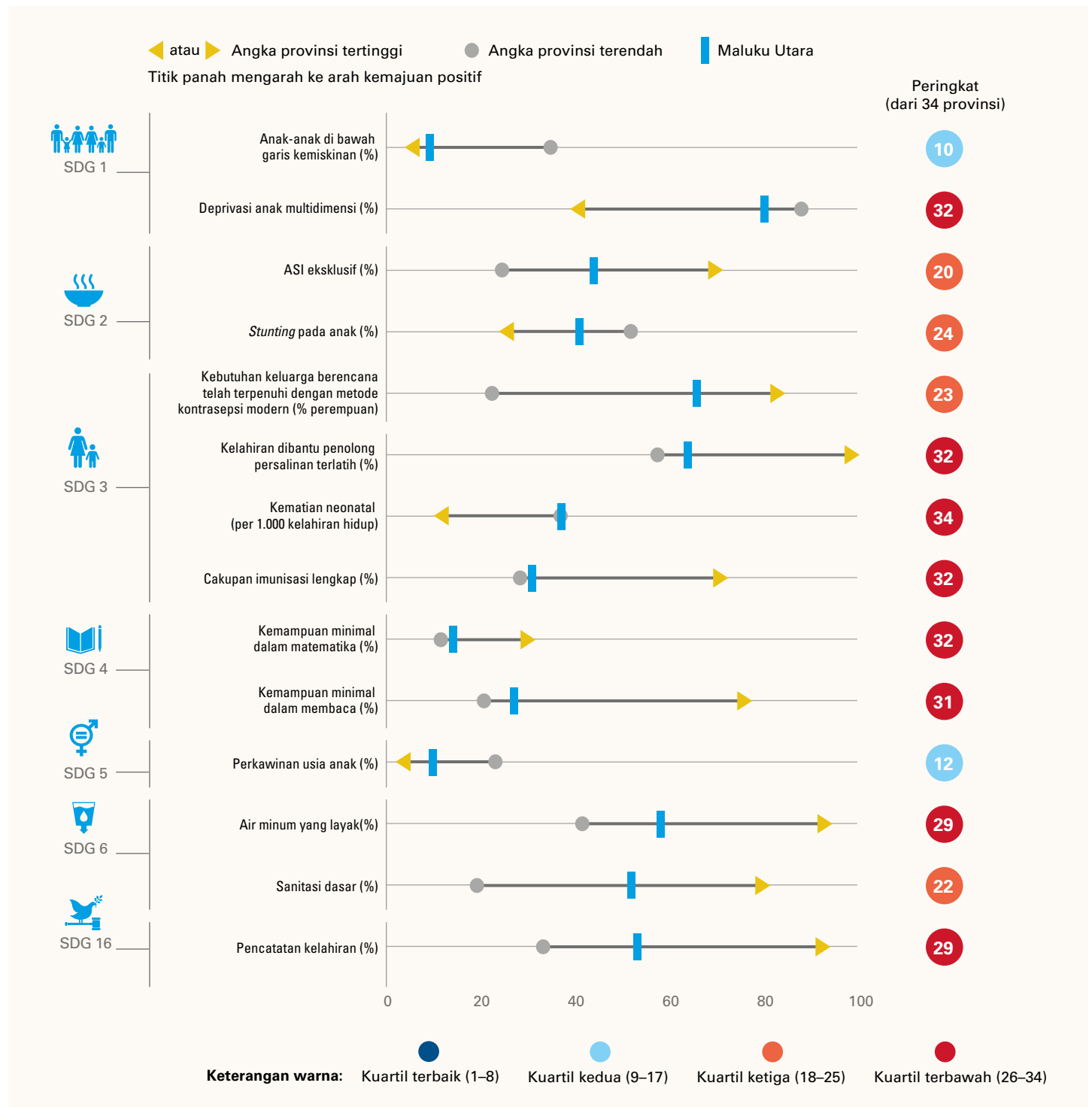
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi Maluku Utara dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi Maluku Utara dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi Maluku Utara untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi detail tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org